Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

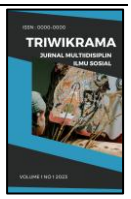

Transformasi Stratifikasi Sosial dari Agraris ke Pariwisata: Dampak Kebijakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) terhadap Struktur Masyarakat Ubud

Maya Riani Adhari, Hendi Irawan S.Pd.,M.Kesos

[123] Universitas Indraprasta PGRI

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juli 2026
Revised Juli 2026
Accepted Juli 2026
Available Juli 2026
mayarianiadhari4@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Penetapan Ubud sebagai bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) telah mendorong perkembangan sektor pariwisata yang berdampak pada perubahan struktur sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi stratifikasi sosial masyarakat Ubud akibat pembangunan pariwisata, mengkaji perubahan mata pencaharian dari sektor agraris ke sektor jasa, serta menganalisis dampaknya terhadap lembaga adat dan hubungan sosial masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan studi kasus melalui analisis berbagai jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata telah mendorong alih fungsi lahan, perubahan mata pencaharian, serta munculnya stratifikasi sosial baru yang lebih didasarkan pada kepemilikan modal ekonomi dibandingkan status tradisional. Di sisi lain, lembaga adat tetap berupaya mempertahankan nilai-nilai budaya melalui adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Meskipun pembangunan memberikan manfaat ekonomi, proses tersebut juga menimbulkan ketimpangan sosial, komodifikasi budaya, serta tantangan terhadap keberlanjutan identitas masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan agar kesejahteraan ekonomi dapat dicapai tanpa mengabaikan nilai sosial dan budaya masyarakat Ubud.

Kata kunci: stratifikasi sosial; pembangunan pariwisata; Ubud; sosiologi pembangunan; masyarakat adat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata di Bali telah berkembang melampaui sekadar kunjungan budaya, kini telah bertransformasi menjadi industri masif yang didorong oleh kebijakan strategis pemerintah. Penetapan berbagai wilayah di Bali sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) menjadi mesin utama pembangunan infrastruktur dan promosi global. Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan sering kali menghadapi tantangan teknis dan sosiologis, mulai dari

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

keterbatasan sumber daya hingga hambatan pada lahan-lahan milik perorangan yang harus diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan (Gayatri, n.d.).

Ubud, sebagai jantung pariwisata budaya, mengalami dampak paling signifikan dari tekanan pembangunan ini. Terjadi alih fungsi lahan adat yang drastis, di mana sekitar 15% atau ±46.318 m^2 lahan di Desa Adat Ubud yang dulunya merupakan kawasan agraris dan pemukiman tradisional kini berubah menjadi fasilitas komersial seperti hotel dan vila demi mendukung sektor jasa pariwisata (Yohapadana, 2024). Fenomena ini bukan sekadar perubahan fisik bentang alam, melainkan mencerminkan perubahan struktur sosial yang mendalam. Masyarakat yang dulunya berbasis pada sistem agraris kini dipaksa bertransformasi menjadi pelaku industri jasa. Di satu sisi, perubahan ini meningkatkan pendapatan secara signifikan, namun di sisi lain menciptakan ketimpangan ekonomi dan mengancam kelestarian nilai-nilai budaya serta hubungan sosial yang selama ini terjalin dalam ruang pertanian (Azizah, 2026; Yohapadana, 2024). Oleh karena itu, diperlukan kajian sosiologis untuk memahami bagaimana kebijakan pembangunan ini mengubah tatanan kelas dan ketahanan lembaga adat di Ubud.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pembangunan pariwisata (KSPN) memicu transformasi mata pencaharian dari sektor agraris ke jasa pariwisata di Ubud?
2. Sejauh mana transformasi ekonomi tersebut menciptakan stratifikasi sosial baru dan menggeser relasi kekuasaan antara kasta tradisional dengan kelas ekonomi baru?
3. Bagaimana mekanisme adaptasi dan tantangan lembaga adat (Banjar dan Desa Adat) dalam mempertahankan kedaulatan hukum adat di tengah arus modernisasi dan komodifikasi budaya?

C. Tujuan Penulisan

1. Menganalisis dampak kebijakan pembangunan terhadap pergeseran struktur mata pencaharian masyarakat lokal.
2. Mengkaji munculnya stratifikasi sosial baru dan perubahan status sosial akibat dominasi modal ekonomi pariwisata.
3. Mengevaluasi ketahanan dan dinamika hukum adat dalam merespons arus pembangunan global dan modernisasi.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

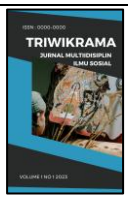

D. Manfaat Penulisan

Memberikan kontribusi pemikiran sosiologis mengenai dampak kebijakan pembangunan nasional terhadap struktur masyarakat lokal, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola pariwisata agar lebih inklusif terhadap nilai-nilai sosial-budaya setempat.

TINJAUAN PUSTAKA / KERANGKA TEORETIS

Teori modernisasi memandang pembangunan sebagai proses evolusi dari masyarakat tradisional-agraris menuju masyarakat modern yang berbasis industri dan jasa. Dalam konteks Bali, modernisasi ini tercermin dari bagaimana hukum adat (Awig-Awig) dipaksa bersikap dinamis menghadapi arus budaya global. Meskipun modernisasi membawa tantangan bagi nilai-nilai tradisional, masyarakat Bali melalui lembaga desanya melakukan adaptasi dengan membuat aturan pelaksana *(pararem)* agar tetap relevan di tengah masyarakat modern (Wiryawan et al., 2015). Perubahan ini sejalan dengan peralihan moda produksi di Ubud, di mana kesibukan masyarakat dalam sektor jasa mulai mengubah ritme kegiatan adat yang kini harus berkompromi dengan waktu industri pariwisata (Azizah, 2026).

Dalam kajian pembangunan, muncul teori pembangunan alternatif yang menekankan bahwa keberhasilan suatu wilayah tidak hanya diukur dari infrastruktur, tetapi dari partisipasi lokal. Model pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan desa wisata berbasis partisipasi terbukti mampu meningkatkan kemandirian ekonomi sekaligus menjaga kearifan lokal seperti gotong royong (Al Mubaroq et al., 2025). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa jika masyarakat memiliki akses penuh terhadap sumber daya dan keterampilan, mereka dapat menghindari marginalisasi. Namun, tantangan utama di kawasan yang sangat berkembang seperti Ubud adalah bagaimana mempertahankan partisipasi tulus tersebut di tengah godaan komersialisasi lahan yang sangat tinggi (Al Mubaroq et al., 2025; Yohapadana, 2024).

Stratifikasi sosial di masyarakat pariwisata tidak lagi semata-mata berbasis pada keturunan atau kasta (status askriptif), melainkan bergeser ke arah kelas ekonomi (status prestasi). Perkembangan wisata di Ubud menciptakan stratifikasi baru yang memisahkan kelompok yang mampu berintegrasi dengan modal industri (pemilik hotel, pengusaha jasa) dengan kelompok yang tertinggal dalam sektor agraris tradisional. Hal ini menciptakan "Kelas Menengah Baru" di Ubud yang memiliki kekuatan ekonomi besar, sehingga sering kali mengubah peta kekuasaan sosial di dalam banjar maupun desa adat (Azizah, 2026). Selain itu, alih fungsi

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

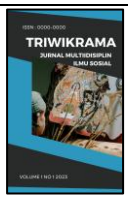

lahan yang masif mengubah pola pemukiman tradisional, yang pada akhirnya memperlemah ikatan sosial berbasis ruang agraris yang dulu sangat kuat (Yohapadana, 2024).

Jika membandingkan perspektif di atas, terlihat bahwa pembangunan di Ubud adalah sebuah proses dialektis. Di satu sisi, Teori Modernisasi (Wiryawan et al., 2015) dan Pembangunan Alternatif (Al Mubaroq et al., 2025) memberikan gambaran optimis tentang adaptasi hukum adat dan potensi kemandirian ekonomi masyarakat melalui partisipasi lokal. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masifnya kebijakan pembangunan pariwisata cenderung menciptakan ketergantungan baru dan stratifikasi sosial yang timpang (Azizah, 2026). Terdapat tegangan antara upaya mempertahankan kedaulatan tanah adat dengan desakan ekonomi global yang memaksa alih fungsi lahan secara masif (Yohapadana, 2024). Dengan demikian, stratifikasi sosial di Ubud saat ini merupakan hasil dari kontestasi antara identitas budaya tradisional dengan tuntutan ekonomi-politik modern yang dibawa oleh kebijakan pembangunan nasional.

METODOLOGI PENULISAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif dengan metode studi literatur dan studi kasus. Melalui jenis penelitian ini, penulis berusaha mendalami fenomena transformasi sosial secara mendalam melalui penelaahan berbagai dokumen, hasil penelitian terdahulu, dan data lapangan yang relevan dengan perkembangan pariwisata di Ubud. Fokus utama dari metode kualitatif ini adalah untuk menangkap makna di balik perubahan struktur masyarakat serta dinamika sosial yang tidak dapat diukur hanya dengan angka-angka statistik, melainkan melalui narasi perubahan sosiologis yang komprehensif.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, khususnya sosiologi pembangunan. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya dalam membedah relasi kuasa, pergeseran stratifikasi sosial, dan perubahan perilaku kolektif masyarakat akibat intervensi kebijakan pembangunan pariwisata (KSPN). Dengan perspektif sosiologis, penulisan ini tidak hanya melihat pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi semata, tetapi sebagai proses restrukturisasi kelas, perubahan status, dan negosiasi identitas masyarakat tradisional di tengah arus modernisasi dan globalisasi.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

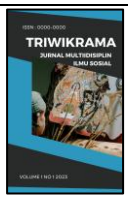

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam kajian ini sepenuhnya merupakan data sekunder. Data tersebut diperoleh melalui penelusuran berbagai literatur ilmiah yang terdiri dari jurnal-jurnal penelitian terkait dampak pariwisata Bali, buku sosiologi pembangunan, laporan kebijakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), serta dokumen pendukung lainnya yang memiliki kredibilitas ilmiah. Kelima jurnal rujukan utama (Jurnal 1-5) menjadi basis data primer bagi penulis dalam menyediakan fakta empiris mengenai alih fungsi lahan, dampak ekonomi-politik, dan perubahan struktur sosial di lokasi kajian.

D. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif-analitis dan komparatif teoretis. Penulis mengumpulkan fakta-fakta pembangunan yang ditemukan dalam literatur, kemudian mendeskripsikannya secara sistematis untuk dianalisis keterkaitannya dengan kerangka teori yang relevan, seperti Teori Modernisasi dan Teori Pembangunan Alternatif. Melalui teknik komparatif teoretis, penulis membandingkan sintesis dari berbagai temuan penelitian untuk merumuskan sebuah argumen kritis mengenai sejauh mana kebijakan pembangunan memengaruhi dinamika stratifikasi sosial pada masyarakat lokal di Ubud.

PEMBAHASAN

Fenomena pembangunan di Ubud saat ini menunjukkan pergeseran makna ruang yang sangat dalam. Jika sebelumnya Ubud dipahami sebagai ruang agraris yang sakral, intervensi kebijakan pembangunan pariwisata telah mengubahnya menjadi komoditas ekonomi global. Hal ini terlihat dari alih fungsi lahan adat yang mencapai 15% untuk kepentingan komersial (Yohapadana, 2024). Namun, transformasi ini tidak berhenti pada fisik bangunan saja, melainkan merambah pada komodifikasi kearifan lokal di bidang kesehatan *(wellness tourism)*. Praktik pengobatan tradisional yang dulunya bersifat sosial-spiritual kini mengalami proses modernisasi dan profanisasi demi memenuhi standar pasar pariwisata (Suteja et al., 2018). Pembangunan di Ubud pada akhirnya menyebabkan "pergeseran fungsi kearifan" dari fungsi sosial menjadi fungsi ekonomi murni, di mana nilai sakral tradisi mulai luntur akibat tekanan orientasi profit.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

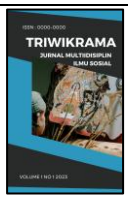

Dalam kacamata Teori Modernisasi, pembangunan pariwisata di Bali, termasuk di kawasan Ubud dan sekitarnya (SARBAGITA), dianggap sebagai langkah evolusioner menuju masyarakat maju. Negara memainkan peran sentral sebagai fasilitator melalui berbagai regulasi seperti Perpres Nomor 34 Tahun 2022 dan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan (Dewi et al., 2024). Modernisasi ini diyakini mampu mendorong pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui lembaga pendidikan pariwisata, dan menciptakan *spread effect* ekonomi ke wilayah sekitarnya (Dewi et al., 2024; Purwanti & Setyari, 2021). Secara teoretis, pertumbuhan ekonomi ini memang terbukti meningkatkan omzet dan aktivitas ekonomi lokal secara signifikan (Fitriyani, 2025). Namun, teori ini cenderung mengabaikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering kali diikuti oleh peningkatan ketimpangan wilayah, di mana wilayah inti (pusat wisata) tumbuh pesat sementara wilayah penyangga tetap tertinggal (Purwanti & Setyari, 2021).

Teori Modernisasi di atas mendapat kritik tajam dari Teori Ketergantungan *(Dependency Theory)*. Kritik utama dalam konteks Ubud dan Bali adalah bahwa pembangunan pariwisata sering kali tidak memberikan kemandirian ekonomi bagi masyarakat lokal, melainkan menciptakan ketergantungan pada rantai pasok global. Fenomena *zero-dollar tourism* dan penggunaan sistem pembayaran digital asing seperti WeChat Pay atau Alipay menjadi bukti nyata adanya kebocoran ekonomi *(economic leakage)*. Transaksi ekonomi tidak tercatat di sistem keuangan lokal atau pajak daerah, sehingga manfaat ekonomi justru mengalir kembali ke negara asal wisatawan atau investor asing (Fitriyani, 2025). Relasi kekuasaan dalam pembangunan ini terlihat tidak setara; masyarakat lokal sering kali hanya menjadi penonton atau pelaku usaha kecil yang tersingkir dari rantai nilai utama akibat dominasi agen perjalanan asing dan modal besar (Fitriyani, 2025; Gayatri, n.d.).

Dampak sosial dari pertarungan kepentingan ini terlihat pada perubahan struktur dan nilai di tingkat akar rumput. Terjadi ketegangan antara kearifan lokal (seperti sistem Banjar dan Tri Hita Karana) dengan logika pasar pariwisata yang sangat komersial. Meskipun masyarakat Ubud berupaya melakukan "negosiasi budaya" agar tetap relevan secara ekonomi tanpa kehilangan akar spiritualnya (Wirawan, 2025), kenyataannya stratifikasi sosial baru telah terbentuk. Relasi kekuasaan kini sangat ditentukan oleh kepemilikan modal ekonomi daripada status kasta atau adat. Solidaritas sosial yang dulu berbasis pada prinsip *metetulung* dan *menyama braya* kini terancam oleh individualisme dan persaingan bisnis jangka pendek (Azizah, 2026; Suteja et al., 2018). Negara, meskipun mencoba mendorong pembangunan

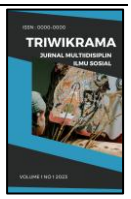

berkelanjutan, sering kali terjepit antara tuntutan investasi global dengan kewajiban melindungi ekosistem sosial-budaya masyarakat adat (Dewi et al., 2024; Wirawan, 2025). Secara keseluruhan, tanpa adanya partisipasi aktif dan penguatan kontrol lokal, pembangunan pariwisata di Ubud hanya akan memperdalam ketimpangan dan memperlemah kedaulatan budaya masyarakat asli.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan pariwisata di Ubud telah menciptakan transformasi struktural yang sangat mendalam pada struktur masyarakat lokal. Peralihan mata pencaharian dari sektor agraris menuju sektor jasa pariwisata bukan sekadar perubahan profesi, melainkan bentuk restrukturisasi kelas sosial yang menggeser dominasi status tradisional berbasis kasta menuju status ekonomi yang berbasis pada penguasaan modal pariwisata. Fenomena alih fungsi lahan adat yang masif secara sosiologis mencerminkan hilangnya kemandirian agraris masyarakat asli yang kini semakin bergantung pada fluktuasi pasar pariwisata global. Meskipun lembaga adat seperti Banjar dan Desa Adat tetap menunjukkan daya tahan melalui adaptasi hukum adat, tantangan besar berupa komodifikasi budaya dan profanisasi nilai-nilai sakral menjadi konsekuensi nyata dari proses modernisasi. Pada akhirnya, pembangunan di Ubud telah melahirkan stratifikasi sosial baru yang lebih kompleks, di mana solidaritas sosial tradisional mulai berhadapan dengan logika persaingan ekonomi industri yang sangat komersial.

B. Saran

Berdasarkan temuan tersebut, arah pembangunan pariwisata di masa depan perlu ditekankan pada penguatan kedaulatan masyarakat lokal melalui regulasi tata ruang yang lebih ketat dalam melindungi lahan pertanian tersisa serta mitigasi terhadap kebocoran ekonomi dari praktik pariwisata asing. Negara diharapkan tidak hanya berperan sebagai fasilitator investasi, tetapi juga sebagai pelindung ekonomi kerakyatan dengan mendorong model pembangunan alternatif yang mengedepankan partisipasi komunitas dan koperasi desa adat. Penting bagi para pemangku kebijakan untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi terdistribusi secara merata guna meminimalisir ketimpangan wilayah dan kelas sosial. Selain itu, masyarakat dan praktisi pariwisata harus tetap menjaga keseimbangan antara fungsi ekonomi dan fungsi sosial-spiritual

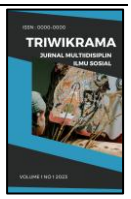

tradisi agar identitas budaya Ubud tidak sepenuhnya larut dalam arus profanisasi, sehingga kemajuan pembangunan tetap berjalan selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Mubaroq, H. N. H., Sholichah, N., & Widyawati. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Partisipasi Lokal melalui Pengelolaan Desa Wisata di Desa Panglipuran,Bali untuk Mendukung Kemandirian Ekonomi. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, *3*(1), 103–119.

Azizah, Z. N. (2026). *Perubahan Struktur Sosial Akibat Perkembangan Wisata di Ubud Bali*. *13*(1), 104–116.

Dewi, N. D. U., Widanti, N. P. T., Sumada, I. M., & Widnyani, I. A. P. S. (2024). Sinergi Pembangunan Wisata Bahari Berkelanjutan dalam Rangka Mewujudkan Visi Maritim 2024 di Pulau Nusa Penida, Klungkung, Bali. *Perspektif*, *13*(2), 598–608. https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i2.11172

Fitriyani, A. N. (2025). Dampak Kunjungan Wisatawan Tiongkok terhadap Ekonomi Lokal di Bali dalam Perspektif Hubungan Internasional. *Diplomacy and Global Security Journal*, *2*(2), 300–323. https://doi.org/10.36859/dgsj.v2i2.4593

Gayatri, I. A. D. L. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Nusa Penida di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali*. 1–12.

Purwanti, P. A. P., & Setyari, N. P. W. (2021). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah di Kawasan Strategis SARBAGITA (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, *18*(2), 189–200. https://doi.org/10.34001/jdeb.v18i1.2300

Suteja, I. W., Ardika, I. W., & Pujaastawa, I. B. G. (2018). Komodifikasi Kearifan Lokal Di Bidang Kesehatan Sebagai Daya Tarik Wellness Tourism Di Ubud. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, *05*, 111. https://doi.org/10.24843/jumpa.2018.v05.i01.p06

Wirawan, P. E. (2025). Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Desa Wisata Ubud: Antara Komersialisasi dan Pelestarian Budaya. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, *30*(2), 249–262.

Wiryawan, I. W. G., Perbawa, K. S. L. P., & Wiasta, I. W. (2015). Hukum Adat Bali di Tengah Pembangunan dan Arus Budaya Global. *Jurnal Bakti Saraswati*, *4*(2), 169–178.

Yohapadana, P. W. (2024). *Dampak Alih Fungsi Pemanfaatan Tanah Adat terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat (Studi di Desa Adat Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar)*.